



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat merampungkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk melaporkan hasil pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2022, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai bahan kajian dan telaahan dalam rangka memberikan penilaian kinerja sekaligus masukan dalam menentukan kebijakan..

Jakarta, 31 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ENDRIE DJOKO SATRIO,S.T.,M.M.

Pembina Tkt.I

NIP.19710311200312 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.3    Isu Strategis .....	13
1.4    Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II   PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>15</b>
2.1    Rencana Strategis 2022-2026 .....	9
2.2    Indikator Kinerja Utama .....	16
2.3    Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	18
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>19</b>
3.1    Capaian Kinerja Organisasi .....	19
<b>BAB IV   PENUTUP</b>	<b>25</b>
4.1    Kesimpulan .....	25
4.2    Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja .....	25
4.3    Saran dan Solusi.....	26
 <b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	6
Gambar 1.2	Kondisi Umum Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	3
Gambar 1.3	Latar Belakang Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	3

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Proporsi APBD-P Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	12
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	18
Tabel	3.1	Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LKjIP Tahun 2022	19
Tabel	3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022	20
Tabel	3.3	Rincian Target & Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran	22
Tabel	3.4	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	23
Tabel	3.5	Akuntabilitas Keuangan Program/ Sasaran Tahun 2022	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga LKjIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mendorong Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Menumbuhkan profesionalitas kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintah.

## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### 1.2.1. Tugas dan Fungsi

#### Tugas

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penghubung Daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

#### Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas dan Promosi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Usaha, Bidang Antar Lembaga, Bidang Pelayanan dan Protokol, dan Bidang Humas

dan Promosi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tersebut diatas Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai rincian tugas:

- a) merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- c) membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- e) merumuskan program kerja dan koodinasi pelaksanaan tugas Bidang Tata Usaha;
- f) merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Antar Lembaga;
- g) merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Protokol;
- h) merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Humas dan Promosi;
- i) merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- k) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung Daerah; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **1.2.2. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau



Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian tata usaha;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian tata usaha;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian tata usaha;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian tata usaha;
- e) menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- f) menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- g) menyiapkan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Badan Penghubung Daerah;
- h) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- i) melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
- j) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- k) menyiapkan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- l) melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/ kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Penghubung Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris,

- penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- m) melaksanakan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
  - n) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian tata usaha;
  - o) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
  - p) dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa Jabatan Fungsional tertentu mengemban tugas sebagai Sub Koordinator.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1505 Tahun 2021, Badan Penghubung Daerah terdiri atas 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Antar Lembaga;
- b. Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol; dan
- c. Sub Koordinator Humas dan Promosi

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Susunan Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau**



### 1.2.3. Uraian Tugas

#### ➤ Sub Koordinator Antar Lembaga

Sub Koordinator Antar Lembaga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Antar Lembaga.

Sub Koordinator Antar Lembaga mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- e) menyusun program kerja dan bahan kebijakan teknis di Sub Koordinator Antar Lembaga;
- f) melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas daerah tertentu di ibu kota Negara;

- g) menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, lembaga-lembaga pusat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Negara sahabat dan pihak swasta;
- h) melaksanakan hubungan kemitraan dan pemberdayaan dengan organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat asal Provinsi Kepulauan Riau, baik yang berada di ibu kota Negara maupun di daerah lainnya;
- i) menyiapkan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
- j) melaksanakan pengelolaan kelembagaan pemerintah dan swasta serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya;
- k) melaksanakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi aspek kelembagaan;
- l) menghimpun dan menganalisa data dalam rangka perencanaan dan pengendalian penyusunan program;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- n) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ **Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol**

Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan dan Protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Pelayanan dan Protokol;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pelayanan dan Protokol;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
- e) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi setiap acara/kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya, berupa transportasi, akomodasi dan makan minum;
- f) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan keprotokolan disetiap acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- g) menyiapkan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi setiap kunjungan tamu ke ibu kota Negara;
- h) melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- i) melaksanakan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah,pemerintah dan internasional;
- j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan Protokoler;
- k) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan Protokoler; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

➤ **Sub Koordinator Humas dan Promosi**

Sub Koordinator Humas dan Promosi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pembinaan, fasilitas dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Humas dan Promosi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Koordinator Humas dan Promosi mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Humas dan Promosi; membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- b) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- c) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- d) melaksanakan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas di luar Provinsi Kepulauan Riau;
- e) melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
- f) membuka jaringan informasi di Bandara Soekarno Hatta;
- g) melaksanakan kegiatan di bidang publikasi, hubungan media dan pengolahan data;
- h) melaksanakan dan mengumpulkan serta mengolah dan menyajikan data untuk menyusun standard pelayanan promosi dan penyampaian informasi di bidang pembangunan dan potensi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan investasi;
- i) melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII;
- j) melaksanakan koordinasi dan kerjasama kemitraan di bidang promosi potensi daerah dan kepariwisataan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam negeri maupun di luar negeri;
- k) melaksanakan, menghimpun, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil dan potensi alam, hasil pembangunan, komoditas unggulan Kepulauan Riau;

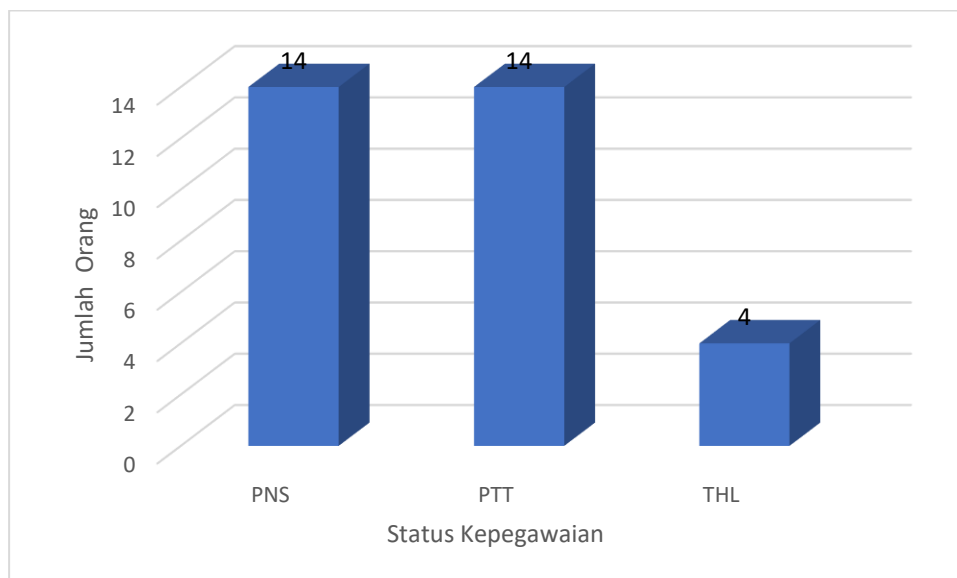
- l) melaksanakan, menghimpun, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil seniman, budayawan dan kelompok seni budaya daerah Kepulauan Riau yang ada di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- m) melaksanakan kegiatan pameran, pagelaran, festival, bazar dan kegiatan seni budaya baik di dalam maupun di luar negeri;
- n) melaksanakan kerjasama dengan sanggar seni budaya asal Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya dalam mengisi program dan kegiatan Anjungan Daerah Kepulauan Riau di TMII;
- o) melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan perangkat daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Kepulauan Riau;

#### **1.2.4. Sumber Daya Manusia**

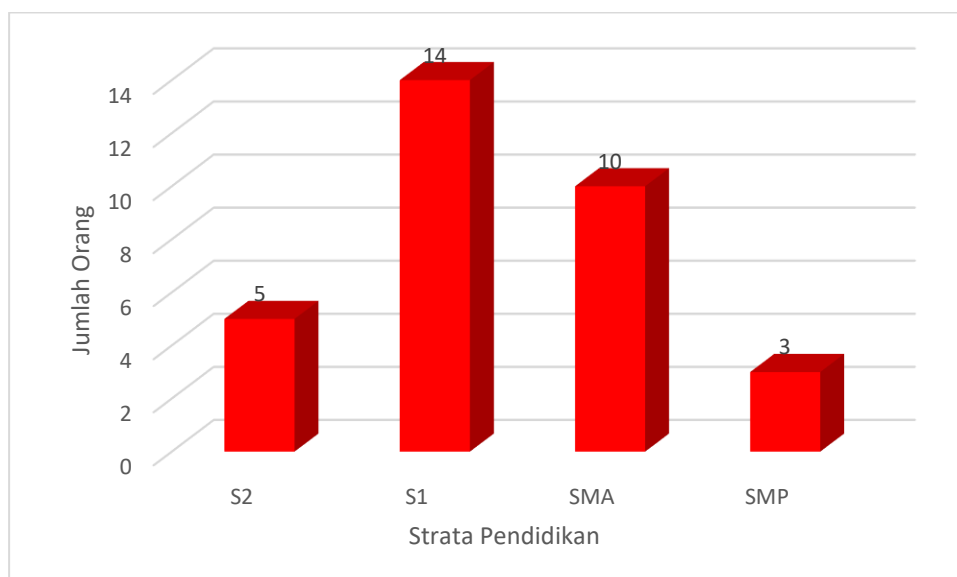
Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut beragam menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Kondisi yang beragam tersebut saling bekerjasama guna menghasilkan kinerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Gambaran kondisi pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Jumlah pegawai di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2022, berjumlah 32 orang yang terdiri dari 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 14 Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta 4 Tenaga Harian Lepas (THL).

**Gambar 1.2**  
**Kondisi Umum Pegawai**  
**Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**



**Gambar 1.3**  
**Latar Belakang Tingkat Pendidikan Pegawai**  
**Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**



### 1.2.5. Anggaran

Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Murni dengan jumlah pagu sebesar Rp



4.560.152.366 ,- (*empat miliar lima ratus enam puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), selanjutnya pada APBD-P ,pagu anggaran berubah menjadi Rp5.469.035.519 ,- (*lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah*) yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 yang terinci untuk pembiayaan Belanja Langsung (Belanja Program), sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Proporsi APBD-P**  
**Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA 2022
			(Rp)
1	2	3	4
	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>	<b>11</b>	<b>5,469,035,519.00</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>8</b>	<b>3,572,530,032.00</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>17,325,900.00</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		17,325,900.00
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>2,505,729,517.00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,359,009,517.00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		146,720,000.00
<b>III</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>130,425,213.00</b>
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		130,425,213.00
<b>IV</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>842,884,000.00</b>
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		742,420,000.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		74,000,000.00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		26,464,000.00

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA 2022 Rp.
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		76,165,402.00
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		76,165,402.00
B	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>3</b>	<b>1,896,505,487.00</b>
I	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>		<b>1,896,505,487.00</b>
1	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		1,024,199,067.00
2	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		262,545,471.00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		609,760,949.00
	<b>TOTAL</b>		<b>5,469,035,519.00</b>

### 1.3 Isu Strategis

Isu strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang nya adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana prasarana Badan Penghubung Daerah yang memadai;
2. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi sesuai kebutuhan;
3. Belum optimalnya kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi potensi daerah;
4. Belum optimalnya kegiatan pembinaan masyarakat Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya di luar Provinsi Kepulauan Riau.
5. Keterbatasan anggaran yang diperoleh oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

## 1.4. Sistematika Penulisan

LKjIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang dan gambaran umum organisasi dan isu strategis organisasi serta sistematika penulisan.

### Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang rencana strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisa capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

### Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LKjIP.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis 2022-2026**

Upaya mencapai tujuan pelayanan maksimal untuk menginformasikan hasil kerja dan pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pembangunan daerah, perlu ditopang dengan komitmen dan langkah gerak yang sinergis instansi pemerintah. Oleh karena itu dalam mewujudkan kinerja instansi, Badan Penghubung Daerah memerlukan sebuah landasan dalam melaksanakan kinerja tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran lima tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Disamping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2017-2019.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara, mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penghubung daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Untuk mewujudkan peran tersebut dan terkait penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah maka Badan Penghubung Daerah wajib merumuskan dan menetapkan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2022, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan masih menggunakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, hal ini dikarenakan pada tahun 2021, Badan Penghubung Daerah merupakan salah satu bagian yang berada di dalam struktur organisasi Biro Humas Protokol dan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bagian Penghubung dan Kerjasama. Renstra ini juga menggambarkan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja hingga pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai

dengan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Berikut IKU Badan Penghubung Daerah tahun 2022:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(1)	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	Jumlah kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri di luar wilayah Provinsi Kepri yang difasilitasi dibagi jumlah seluruh kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri di luar wilayah Provinsi Kepri dikali 100	Renstra Setda Provinsi Kepri 2021-2026

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Penghubung Daerah telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah dengan Gubernur Kepulauan Riau.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Penghubung Daerah**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	86,00%
		2	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	86,00%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	3.572.530.032	APBD-P
2	Program Pelayanan Penghubung	Rp	1.896.505.487	APBD-P

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan *progress* kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja**  
**LKJIP Tahun 2022**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Interprestasi dan Karakteristik
(1) 1	(2) >100%	(3) Sangat Baik	(4) Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik.
2	75% - 100%	Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.
3	55% - 74%	Cukup Baik (memadai)	Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.
4	<50%	Kurang	Memiliki sistem manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar



Pada tahun 2022, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah Tahun 2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, yang mana terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu:

**Sasaran Strategis :**

***Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah***

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun tahun 2022, yaitu Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor dan Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran yang dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	86	86,55	100,64
2	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	86	86,55	100,64

Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor dihitung berdasarkan pendanaan yang ada dibagi pendanaan yang dibutuhkan dikali

100, sedangkan persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi merupakan hasil perhitungan Jumlah kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri di luar wilayah Provinsi Kepri yang difasilitasi dibagi jumlah seluruh kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri di luar wilayah Provinsi Kepri dikali 100.

Hasil evaluasi dari 2 Indikator Kinerja tersebut diatas adalah bahwa target 2 Indikator Kinerja tersebut diatas dengan target 86% dapat terealisasi sebesar 86,55% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100,64 % atau dalam kategori kinerja Sangat Baik.

Badan Penghubung Daerah tidak dapat menyajikan perbandingan capaian indikator kinerja 2 (dua) Indikator Kinerja tersebut diatas pada tahun 2022 dan 2021, hal ini dikarenakan Badan Penghubung Daerah baru terbentuk dan beroperasi pada awal tahun 2022.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, adalah sebesar **Rp5.296.945.145** ,- atau 96,85 % dari total anggaran sebesar **Rp5.469.035.519,-** ,hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 3,15% dari anggaran yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran **Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor** tidak terlepas dari pelaksanaan **1 (satu) program dengan 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan**, yaitu:

1. 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. 5 (lima) Kegiatan, yaitu:
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. 8 (delapan) Sub Kegiatan yaitu:
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 5) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 7) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sedangkan keberhasilan pencapaian sasaran **Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi** tidak terlepas dari pelaksanaan **1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan**, yaitu:

1. 1 (satu) Program, yaitu Program Pelayanan Penghubung;
2. 1 (satu) Kegiatan, yaitu Pelaksanaan Pelayanan Penghubung;
3. 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
  - 1) Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat;
  - 2) Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya;
  - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif		Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan		Bobot Realisasi dibandingkan dengan Target	
				Target	(Rp.)	Realisasi	(Rp.)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Pelayanan Penghubung	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	86	1,296,823,892	86.55	1,792,227,584.00	100.64	138.20
I	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Frekuensi pelaksanaan pelayanan penghubung	Bulan	12	1,296,823,892	12	1,792,227,584.00	100.00	138.20
1	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Frekuensi Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Bulan	12	744,908,092	12	1,022,470,086.00	100.00	137.26
2	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Frekuensi Peningkatan Fasilitas Promosi Produk	Bulan	12	113,240,000	12	262,271,600.00	100.00	231.61
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Bulan	12	438,675,800	12	507,485,898.00	100.00	115.69
<b>TOTAL</b>							<b>1,296,823,892</b>	<b>1,792,227,584.00</b>	<b>138.20</b>

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 didukung dengan anggaran Belanja sebesar Rp5.469.035.519,- yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau. Secara ringkas komposisi penggunaan dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Tahun 2022**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI RP.	PERSENTASE	SISA ANGGARAN
		ANGGARAN		REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=3-4
	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>	<b>5,469,035,519.00</b>	<b>5,296,945,145.00</b>	<b>96.85</b>	<b>172,090,374.00</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>				
<b>A</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>3,572,530,032.00</b>	<b>3,504,717,561.00</b>	<b>98.10</b>	<b>67,812,471.00</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17,325,900.00</b>	<b>16,891,634.00</b>	<b>97.49</b>	<b>434,266.00</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17,325,900.00	16,891,634.00	97.49	434,266.00
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,505,729,517.00</b>	<b>2,469,230,531.00</b>	<b>98.54</b>	<b>36,498,986.00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,359,009,517.00	2,324,550,531.00	98.54	34,458,986.00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146,720,000.00	144,680,000.00	98.61	2,040,000.00
<b>III</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>130,425,213.00</b>	<b>118,278,713.00</b>	<b>90.69</b>	<b>12,146,500.00</b>
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130,425,213.00	118,278,713.00	90.69	12,146,500.00
<b>IV</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>842,884,000.00</b>	<b>825,982,883.00</b>	<b>97.99</b>	<b>16,901,117.00</b>
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	742,420,000.00	741,449,500.00	99.87	970,500.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,000,000.00	58,299,883.00	78.78	15,700,117.00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,464,000.00	26,233,500.00	99.13	230,500.00
<b>V</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76,165,402.00</b>	<b>74,333,800.00</b>	<b>97.60</b>	<b>1,831,602.00</b>
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76,165,402.00	74,333,800.00	97.60	1,831,602.00
<b>B</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>1,896,505,487.00</b>	<b>1,792,227,584.00</b>	<b>94.50</b>	<b>104,277,903.00</b>
<b>I</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>1,896,505,487.00</b>	<b>1,792,227,584.00</b>	<b>94.50</b>	<b>104,277,903.00</b>
1	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1,024,199,067.00	1,022,470,086.00	99.83	1,728,981.00
2	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	262,545,471.00	262,271,600.00	99.90	273,871.00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	609,760,949.00	507,485,898.00	83.23	102,275,051.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,469,035,519.00</b>	<b>5,296,945,145.00</b>	<b>96.85</b>	<b>172,090,374.00</b>

**Tabel 3.4**  
**Akuntabilitas Keuangan Program/**  
**Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket.
					(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Umum dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,64	3.572.530.032	3.504.717.561	98,10	Efisien
		Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	100,64	1.896.505.487	1.792.227.584	94,50	Efisien

## BAB IV P E N U T U P

### 4.1. Kesimpulan

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penghubung daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi, maka Badan Penghubung Daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian yang diperoleh berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dalam melaksanakan tugasnya Badan Penghubung Daerah dapat dikatakan **Berhasil**, karena target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

- 1) Hasil pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar 100.64%;
- 2) Realisasi Belanja APBD Perubahan Badan Penghubung Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp5.296.945.145,-** atau **(96,85%)** dari Total APBD Perubahan tahun 2022 sebesar **Rp5.469.035.519,-**, hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar **3.15%**.

### 4.2. Permasalahan atau Kendala dalam Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya sarana prasarana Badan Penghubung Daerah yang memadai;
2. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi sesuai kebutuhan;

3. Belum optimalnya kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi potensi daerah;
4. Belum optimalnya kegiatan pembinaan masyarakat Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya di luar Provinsi Kepulauan Riau.

### 4.3. Saran dan Solusi

Upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, serta pemeliharaan secara optimal, sehingga terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
2. Melakukan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan kemampuan SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi potensi daerah, baik melalui Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII ataupun berkolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Paguyuban Masyarakat/ Mahasiswa Kepulauan Riau yang berdomisili di luar Provinsi Kepulauan Riau melalui sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan Masyarakat/ Mahasiswa Perantau asal Kepulauan Riau.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kinerja di masa yang akan datang.

# LAMPIRAN



**TABEL 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Humas, Protokol dan Penghubung**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	1.296.823.892													Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
						2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target			Rp
						7	8	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	19			20
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	85	85	86	26,699,299,355	87	27,267,375,762	88	29,351,074,935	89	31,568,934,051	90	34,003,571,415	90	34,003,571,415	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	n/a	2	9	900,000,000	9	925,000,000	9	975,000,000	9	925,000,000	9	1,080,000,000	9	1,080,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	n/a	n/a	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	250,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	n/a	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	n/a	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	n/a	2	2	200,000,000	2	225,000,000	2	250,000,000	2	225,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	n/a	n/a	1	150,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	85	85	86	1,150,000,000	87	1,150,000,000	88	900,000,000	89	1,310,000,000	90	1,325,000,000	90	1,325,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Stel	n/a	n/a	300	300,000,000	300	300,000,000	0	-	300	300,000,000	0	-	0	-	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	n/a	n/a	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	n/a	n/a	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Orang	n/a	0	50	300,000,000	50	300,000,000	50	300,000,000	60	360,000,000	70	420,000,000	70	420,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	n/a	0	100	250,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	150	525,000,000	150	525,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	n/a	12	12	4,253,000,000	12	4,407,000,262	12	5,350,000,000	12	5,850,934,051	12	6,543,571,415	12	6,543,571,415	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	n/a	12	12	225,000,000	12	225,000,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	12	350,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	n/a	12	12	602,400,000	12	606,400,262	12	700,000,000	12	750,934,051	12	793,571,415	12	793,571,415	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	n/a	12	12	1,350,000,000	12	1,400,000,000	12	1,750,000,000	12	1,900,000,000	12	2,200,000,000	12	2,200,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Bahan/Material	Frekuensi pemenuhan bahan material	Bulan	n/a	12	12	375,600,000	12	375,600,000	12	450,000,000	12	500,000,000	12	600,000,000	12	600,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	n/a	12	12	1,700,000,000	12	1,800,000,000	12	2,200,000,000	12	2,400,000,000	12	2,600,000,000	12	2,600,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	n/a	0	23	1,340,865,500	27	1,500,000,000	26	1,100,000,000	26	1,233,000,000	28	1,700,000,000	28	1,700,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Unit	n/a	n/a	3	900,000,000	2	1,000,000,000	1	500,000,000	0	-	3	900,000,000	3	900,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	n/a	n/a	0	-	0	-	0	-	1	500,000,000	0	-	0	-	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	n/a	n/a	20	440,865,500	25	500,000,000	25	600,000,000	25	733,000,000	25	800,000,000	25	800,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	n/a	12	12	6,553,315,500	12	6,585,375,500	12	6,790,000,000	12	6,900,000,000	12	7,050,000,000	12	7,050,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	n/a	12	12	70,000,000	12	70,000,000	12	90,000,000	12	100,000,000	12	125,000,000	12	125,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	n/a	12	12	529,341,500	12	529,341,500	12	550,000,000	12	550,000,000	12	575,000,000	12	575,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	n/a	12	12	217,940,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	n/a	12	12	5,736,034,000	12	5,736,034,000	12	5,850,000,000	12	5,900,000,000	12	5,950,000,000	12	5,950,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Bulan	n/a	12	12	735,000,000	12	750,000,000	12	836,074,935	12	875,000,000	12	955,000,000	12	955,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	n/a	n/a	12	300,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	12	350,000,000	12	400,000,000	12	400,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	n/a	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	136,074,935	12	150,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	n/a	12	12	335,000,000	12	350,000,000	12	350,000,000	12	375,000,000	12	380,000,000	12	380,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Materi dan Pimpinan yang Komunikasi	Persentase Materi dan Komunikasi yang terfasilitasi	%	n/a	100	100	8,237,118,355	100	8,350,000,000	100	9,350,000,000	100	9,725,000,000	100	10,150,000,000	100	10,150,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen penyiapan materi pimpinan	Dokumen	n/a	0	532	325,000,000	573	350,000,000	655	400,000,000	696	425,000,000	737	450,000,000	737	450,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi penyangan dan pemberitaan kegiatan KDh/WKDh pada media massa dan media informasi lainnya	Bulan	n/a	12	12	7,462,118,355	12	7,500,000,000	12	8,400,000,000	12	8,700,000,000	12	9,000,000,000	12	9,000,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Frekuensi pemenuhan Dukungan Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Bulan	n/a	12	12	450,000,000	12	500,000,000	12	550,000,000	12	600,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan sesuai SOP	%	n/a	100	100	3,530,000,000	100	3,600,000,000	100	4,050,000,000	100	4,750,000,000	100	5,200,000,000	100	5,200,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Frekuensi jumlah acara yang difasilitasi	Bulan	n/a	12	12	1,950,000,000	12	2,000,000,000	12	2,150,000,000	12	2,500,000,000	12	2,700,000,000	12	2,700,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi kunjungan tamu KDh/WKDh yang difasilitasi	Bulan	n/a	12	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,200,000,000	12	1,400,000,000	12	1,600,000,000	12	1,600,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Frekuensi pemenuhan dukungan pelayanan keprotokolan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Bulan	n/a	12	12	580,000,000	12	600,000,000	12	700,000,000	12	850,000,000	12	900,000,000	12	900,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3.0221	3.0221	3.03	22,060,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama antar Pemerintah yang difasilitasi	Kali	n/a	12	12	22,060,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Frekuensi fasilitasi kerjasama	Kali	n/a	12	12	22,060,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau
			Program Pelayanan Penghubung	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	85	85	86	1,296,823,892	87	1,896,823,892	88	2,041,823,892	89	2,186,665,087	90	2,311,573,258	90	2,311,573,258	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi																		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatorif														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Kepulauan Riau yang difasilitasi	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Frekuensi pelaksanaan pelayanan penghubung	Bulan	n/a	12	12	1,296,823,892	12	1,896,823,892	12	2,041,823,892	12	2,186,665,087	12	2,311,573,258	12	2,311,573,258	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Frekuensi Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Bulan	n/a	12	12	744,908,092	12	1,050,000,000	12	1,150,000,000	12	1,250,000,000	12	1,320,000,000	12	1,320,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Frekuensi Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Bulan	n/a	12	12	113,240,000	12	106,823,892	12	136,823,892	12	161,665,087	12	191,573,258	12	191,573,258	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Bulan	n/a	12	12	438,675,800	12	740,000,000	12	755,000,000	12	775,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000	Biro Humas Protokol Penghubung	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau
									28,018,183,247		29,164,199,654		31,392,898,827		33,755,599,138		36,315,144,673		158,646,025,539		